

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan suatu hal yang paling penting bagi kelangsungan suatu organisasi baik itu organisasi swasta maupun organisasi milik pemerintah (lembaga pemerintahan ataupun kementerian). Anggaran merupakan kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran bisa dikatakan sebagai alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam unit dan uang. Begitupun anggaran yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung.

Saat ini pemerintah telah meninggalkan konsep Anggaran Tradisional dan beralih ke *New Public Management* atau yang berorientasi pada kinerja bukan kebijakan. Pedoman anggaran berbasis kinerja diatur dalam Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah menjadi Pemandagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah saat ini telah mempunyai kewenangan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung transparansi serta akuntabilitas manajemen sektor publik.

Setelah proses anggaran selesai, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya agar anggaran tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah ataupun lembaga yang terkait, supaya sumber daya yang diterima dapat dialokasikan dengan baik dan berdampak kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, dengan melakukan analisis terhadap data-data yang ada maka ditemukan permasalahan, atas rendahnya penyerapan anggaran di BPKA Kota Bandung dan disertai adanya penurunan presentase penyerapan anggaran pada tahun 2014. Untuk lebih jelas di bawah ini merupakan perbandingan penyerapan realisasi anggaran terhitung dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.1

Data Laporan Realisasi Anggaran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2013

UNIT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	%
Belanja Pegawai	183.403.623.334	162.332.577.849	88,51
Belanja Barang	776.478.011.824	684.295.757.477	88,12
Belanja Modal	1.429.167.838.242	1.064.845.440.110	74,50
Jumlah	2.389.049.473.400	1.913.473.175.436	80,09

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung 2013 (Diolah)

Tabel 1.2
Data Laporan Realisasi Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2014

UNIT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	%
Belanja Pegawai	209.987.702.032	186.785.578.770	88,95
Belanja Barang	1.196.988.185.036	937.333.189.024	78,30
Belanja Modal	1.607.514.078.873	971.440.599.331	60,43
Jumlah	3.014.489.965.941	2.095.559.367.125	69,51

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung 2014(Diolah)

Tabel 1.3
Data Laporan Realisasi Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2015

UNIT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	%
Belanja Pegawai	273.230.201.390	242.324.489.985	88.69
Belanja Barang	1.587.229.827.290	1.288.180.584.635	81.16
Belanja Modal	1.908.650.351.654	1.287.802.827.811	67.47
Jumlah	3.769.200.380.334	2.818.307.902.431	74,77

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung 2015(Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah belanja yang dianggarkan untuk membiayai program/kegiatan yang menunjukkan bahwa adanya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan alokasi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini terlihat bahwa realisasi anggaran tidak pernah terserap atau terealisasi hingga 100%, bahkan pada tahun 2014 mengalami penurunan presentase 10,58% dengan presentase 69,51% dari tahun sebelumnya yang mempunyai presentase 80,09%. Penyebab terjadinya permasalahan realisasi

penyerapan anggaran yang rendah dan penurunan presentase penyerapan anggaran di tahun 2014 dikarenakan oleh beberapa faktor yang dapat disimpulkan oleh penulis dari hasil observasi awal diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya perencanaan yang kurang optimal serta adanya program-program yang belum terealisasi, dibuktikan dengan penyerapan di tahun 2014 yang hanya mencapai 69,51%
2. Keterlambatan pelaksanaan anggaran atau adanya pelaksanaan anggaran yang tidak tepat waktu yang harusnya selesai pada akhir periode namun diawal periode masih belum selesai.

Berdasarkan data dan fenomena diatas, penulis menganggap penting dilakukan penelitian melalui judul **“PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN PADA BPKA KOTA BANDUNG.**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis membatasi permasalahan-permasalahan menjadi beberapa yaitu:

1. Penyerapan realisasi anggaran yang rendah di tahun 2014 yang hanya menyerap 69,51%.
2. Keterlambatan dalam menyusun pelaksanaan anggaran yang harusnya selesai di akhir periode namun di awal periode baru masih belum selesai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang dan Identifikasi Masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah, seberapa besar pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran pada BPKA Kota Bandung?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas yang telah di paparkan, maka rumusan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui besaran pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran pada BPKA Kota Bandung.

E. Kegunaan Penulisan

1. Kegunaan Teoritis

Dapat dipergunakan untuk menelaah atau menambahkan khasanah keilmuan khususnya bidang Administrasi Publik konsentrasi Administrasi Keuangan Publik yang secara khusus mengkaji mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk Penulis

- 1) Memperoleh gambaran langsung mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran.
- 2) Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penulis selanjutnya.

3) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang Administrasi Publik secara teoritis maupun praktis, serta sebagai bahan untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh penulis antara teori yang diperoleh penulis dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, dan melangkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ilmu politik program Administrasi Publik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Untuk Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Instansi khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah direncanakan juga perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

c. Untuk Penulis Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai referensi dengan bidang yang sama secara mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Fokus pemikiran penelitian ini adalah pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran pada badan pengelolaan keuangan dan aset

Kota Bandung, yang menjelaskan salah satu pelaksanaan dari kegiatan administrasi publik, terkhusus administrasi keuangan publik.

Administrasi menurut Sahya Anggara (2012:11) diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik.

Keuangan Negara menurut Sahya Anggara, adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki/dan atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya.

Teori yang digunakan adalah teori anggaran berbasis kinerja yang dikemukakan oleh Bastian (2010:202) yang menyatakan bahwa Anggaran berbasis kinerja adalah system pengorganisasian yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi. Dimana anggaran berbasis kinerja mengalokasikan sumber daya ke program bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran *output* sebagai indikator kinerja organisasi.

Adapun dimensi dari anggaran berbasis kinerja sebagai berikut (Bastian, 2010:61-62):

1. Efisiensi

Efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk

menghasilkan *output* tersebut. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya.

2. Ekonomi

Indikator ekonomis merupakan indikator tentang penggunaan *input*. Pada dasarnya ekonomi lebih kepada *input*, efisiensi tentang *input* dan *output*, serta efektivitas yang berhubungan dengan *output*.

3. Efektivitas

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Tujuan-tujuan organisasi harus spesifik, *detail*, dan terukur.

Sedangkan menurut Halim (2012:68) Efektivitas Realisasi Anggaran adalah tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*, dimana *outcome* seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang akan dicapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan.

Adapun dimensi Efektivitas Realisasi Anggaran sebagai berikut (Dharma 2001:154) :

1. Kuantitas, jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau

pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.

2. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan, yaitu seberapa baik penyelesaiannya dan berkaitan dengan bentuk keluaran.
3. Ketepatan Waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian waktu kegiatan.

Teori atau konsep penghubung anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

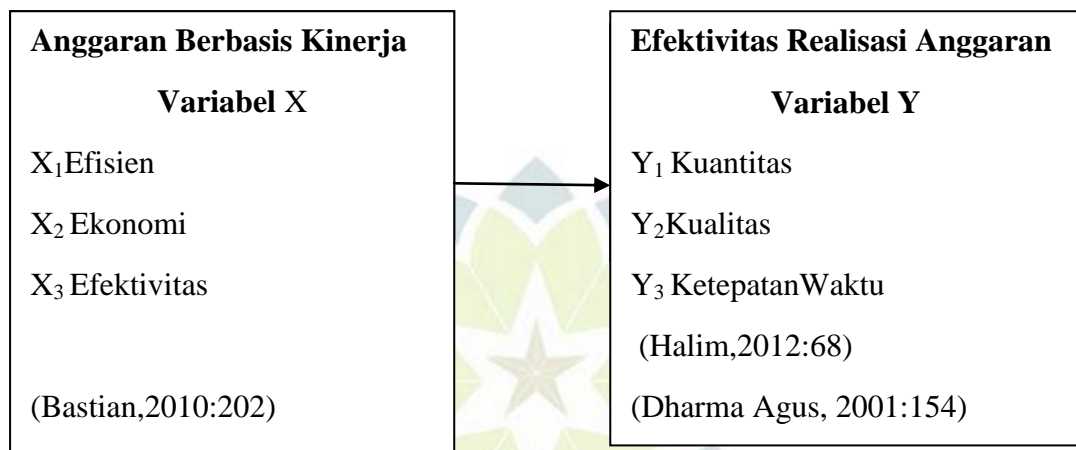
Halim (2012:30) mengatakan bahwa:

“efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang telah tersedia, dan dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan. Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif”

Pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan oleh Halim diatas mengacu kepada pertanggung jawaban mengenai penggunaan, pengalokasian dan merealisasikan sumber daya (anggaran) yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran. Disamping itu anggaran berbasis kinerja merupakan alat atau tolak ukur mengenai penilaian kinerja pegawai dalam suatu instansi tertentu yang berimbang kepada efektif atau tidak realisasi anggaran tersebut.

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



(Sumber: Diolah oleh penulis Tahun 2017)

G. Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2014:70) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan acuan kerangka pemikiran diatas, maka untuk hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Ha : Terdapat pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran pada BPKA Kota Bandung.

H₀ : Tidak terdapat pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran pada BPKA Kota Bandung.